

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : PT.Ginanjari Tak Becus Kelola Infrastruktur

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Radar Bandung / Hal.7

Edisi : Kamis, 6 september 2018

## PT.Ginanjari tak Becus Kelola Infrastruktur

**BANDUNG** - Terbakarnya pasar Gedebage yang terjadi beberapa hari lalu masih menyisakan kemelut di dalamnya. PT.Ginanjari selaku perusahaan swasta yang mengelola 300 kios terbakar hingga kini masih belum memberikan tanggapan.

Pasalnya, perusahaan tersebut dianggap tidak becus mengelola infrastruktur dengan mengabaikan standar keamanan yakni tidak berfungsinya tabung pemadam.

Terkuak informasi, dalam kurun waktu dua tahun terjadi delapan kali si jago merah melahap kios-kios yang ada di pasar Gedebage. Meski terus terulang, pihak PT.Ginanjari tidak memberikan solusi atau pun memperbaiki penyebab dari kebakaran tersebut. Salah satu pedagang,

Abdun Yatmari, setelah terjadi kebakaran pihak swasta mendatangi para pedagang yang kiosnya hangus dan menawarkan perbaikan kios. Sudah jatuh tertimpa tangga, para pedagang yang seharusnya mendapatkan kompensasi justru di bebankan dengan biaya renovasi oleh PT.Ginanjari.

Abdun yang sudah 27 tahun berdagang di lahan milik PT.Ginanjari mengaku harus mengeluarkan uang hingga Rp 15 juta untuk biaya renovasi. Kios yang dimiliki pedagang sayuran itu memiliki luas 4x3 meter persegi. "Mereka tawarkan perbaikan kios tetapi kami harus membayar Rp 2,5 juta per meter. Padahal kalau kita swadaya sendiri, dihitung-hitung hanya perlu Rp 1 juta. Disini kiosnya berbeda-beda ukuran, ada yang 2x3 meter hingga 9x4 meter persegi," jelasnya kepada Radar di lokasi, Rabu (5/9).

Para pedagang yang merasa keberatan diberikan keringanan dengan cicilan setiap bulannya.

Namun, apabila telat membayar akan di denda sebesar Rp 100 ribu yang jelas semakin memberatkan para korban. "Sok nuncan mayar lunasan, mun henteu di kembalikan uangnya (Silahkan yang bayar di lunasin, kalau tidak di kembalikan uang mukanya)," sambungnya.

Mirisnya, biaya Rp 2,5 juta per meter tersebut hanya untuk lahan saja. Perbaikan infrastruktur kios dikenakan biaya lagi. Saat

awal berdagang, Abdun dikenakan biaya uang muka sebesar Rp 5 juta. Apabila dalam tempo yang sudah disepakati diatas materai tidak dilunasi, maka uang tersebut dikembalikan ke pedagang sehingga mereka tidak bisa kembali berjualan.

"Akhirnya karena kita mau jualan disini, sudah lama juga, ya sepakat membayar Rp 2,5 juta per meter," sambungnya. Ia menyesalkan tidak ada tanggapan dari pihak swasta untuk memperbaiki masalah ini sehingga kebakaran kembali terulang. Pasar Gedebage secara pengelolaan terbagi menjadi dua yakni oleh PD Pasar Bermartabat dan PT.Ginanjari. Kebakaran pada 15 Juli lalu juga berada dilahan milik swasta.

Ditempat yang sama, anggota DPRD Kota Bandung memantau lokasi kebakaran dan melakukan diskusi dengan tokoh pasar dan kepala PD Pasar Bermartabat. Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nenden Sukaesih, menuturkan akan memanggil PT.Ginanjari, perwakilan peda-

gang, dan PD Kebersihan untuk duduk bersama mencari jalan keluar. Ia menilai, pihak swasta terkesan mencari kesempatan dari musibah kebakaran ini.

"Mereka meminta uang renovasi sebesar Rp 2,5 juta per meter. Itu menambah beban mereka, yang seharusnya diberi bantuan justru di beri tambahan biaya," katanya. Nenden mempertanyakan pertanggungjawaban dari swasta, ia mendesak PT.Ginanjari segera membenahi infrastruktur yang setelah dilakukan peninjauan tabung pemadam tidak berfungsi sehingga kebakaran tidak bisa segera dipadamkan.

"Kalau hydran jalan, saluran air lancar tidak akan terbakar. Lalu saat memasuki musim hujan pasti banjir, musim kemarau kebakaran. Ini ada apa? Ada yang tidak beres," ungkapnya.

Selain membenahi infrastruktur, Nenden juga meminta PT.Ginanjari untuk memperhatikan hak yang dimiliki pedagang yaitu kenyamanan berdagang. (td)